



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah .

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang memimpin wilayah kerja Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

## BAB II KELURAHAN

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah juga mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemerintah tingkat atasnya kepada Kelurahan.

### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Sekretariat Kelurahan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja Kelurahan;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - d. pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
  - e. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Kelurahan;
  - f. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja Kelurahan;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.
- (3) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Kelima  
Seksi Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang pemerintahan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
  - c. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemerintahan;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemerintahan tingkat Kelurahan;
  - g. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kelurahan;
  - h. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemerintahan;
  - j. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.
- (3) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Keenam  
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang kemasyarakatan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemasyarakatan;
  - c. penyusunan bahan koordinasi di bidang kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan pembinaan di bidang kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - e. penyiapan bahan fasilitasi kegiatan keagamaan;
  - f. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kemasyarakatan;
  - g. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kemasyarakatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Ketujuh  
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang Kesejahteraan Sosial;
  - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Sosial;
  - c. penyusunan koordinasi di bidang Kesejahteraan Sosial;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - f. penyusunan bahan koordinasi kegiatan pembangunan dan peningkatan swadaya masyarakat;
  - g. pelaksanaan pelayanan umum di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - h. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah.
- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
- (3) Jenis Jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama Tata Kerja

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Kelurahan wajib melaksanakan tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Kelurahan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 11

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Kelurahan wajib mematuhi kebijakan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

## BAB V HUBUNGAN KERJA

### Pasal 12

Hubungan kerja Kelurahan dengan Kecamatan bersifat hirarki.

## BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 13

Penetapan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Struktur, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 8 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

~~SILVERIUS SNOOR~~

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG

  
BERNADETA, SH, MH  
NIP. 197104162000032005



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN  
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 52 TAHUN 2016  
TANGGAL : 7 Desember 2016  
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT